



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: /PER/M.KOMINFO/ /2012

**TENTANG
PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (ICT FUND)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa layanan pita lebar (*broadband*) sudah menjadi kebutuhan dasar yang berdampak dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. bahwa untuk menggelar layanan pita lebar (*broadband*) secara nasional dibutuhkan percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh pelosok wilayah Indonesia;
 - c. bahwa diperlukan model pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi;
 - d. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Fund*) masih terdapat kekurangan dan belum dapat diimplementasikan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Fund*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Masterplan* Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa PresidenRepublikIndonesia
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PER/M/KOMINFO/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor:17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (*ICT FUND*).

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup adalah badan hukum yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang menyediakan dan memberikan pelayanan jaringan untuk disewakan.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
3. Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut KPU adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
4. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat BPPPTI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
5. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal yang selanjutnya disebut KPU/USO adalah kontribusi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi dan dikelola oleh BPPPTI.
6. Jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi berbasis serat optik selanjutnya disebut jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring.
7. Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut pembiayaan TIK (*ICT Fund*) adalah pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan tulang punggung pita lebar (*broadband*) TIK.
8. Mitra kerjasama pelaksana pengoperasian dan pemeliharaan jaringan serat optik yang selanjutnya disebut Mitra kerjasama adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang ditetapkan melalui proses tender.
9. Bentuk konfigurasi ring adalah bentuk jaringan yang memiliki keterhubungan dua arah sehingga jika terputus satu jalur maka masih memiliki jalur alternatif lainnya.

10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan informatika.

Pasal 2

Pemanfaatan Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Bersaing
- e. Adil/tidakdiskriminatif;
- f. Akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pemanfaatan pembiayaan TIK (*ICT Fund*) meliputi:

- a. peningkatan pemerataan dan pengembangan infrastruktur TIK;
- b. mengoptimalkan penggunaan dana KPU/USO;
- c. sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan jaringan serat optik; dan
- d. sebagai solusi persoalan pemerataan konektivitas pita lebar (*broadband*) agar menjangkau hingga seluruh kota/kabupaten seluruh Indonesia dengan harga terjangkau.

Pasal 4

Ruang lingkup pemanfaatan pembiayaan TIK (*ICT Fund*) meliputi:

- a. penyediaan jaringan serat optik;
- b. penyediaan jaringan gelombang mikro (*microwave*); dan
- c. penyediaan jaringan satelit

Pasal 5

- (1) Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari dana PNBPU KPU/USO.
- (2) Kegiatan penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa :
 - a. pembangunan jaringan serat optik; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan serat optik
- (3) Pembangunan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BPPPTI.
- (4) Hasil pembangunan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicatat sebagai barang milik negara.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaannya jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup dalam bentuk kerjasama pemanfaatan

- barang milik negara.
- (6) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Pembiayaan TIK (ICT Fund) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri

Pasal 6

Penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*);
- b. mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor;
- c. mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- d. mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- e. mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antarinstansi pemerintah; dan
- f. mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan microwave dan satelit.

Pasal 7

Pembiayaan TIK (*ICT Fund*) untuk pembangunan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BPPPTI.

Pasal 8

- (1) Setiap usulan pelaksanaan penyediaan jaringan serat optik sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen:
 - a. studi kelayakan;
 - b. daftar wilayah atau lokasi penyediaan beserta rute jaringan;
 - c. kajian kapasitas jaringan yang disediakan;
 - d. *service level agreement*;
 - e. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - f. anggaran yang dibutuhkan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. rencana (*roll out plan*) pembangunan jaringan serat optik milik penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - b. kabupaten/kota yang belum terhubung jaringan serat optik; dan
 - c. bentuk konfigurasi ring.
- (3) Wilayah atau lokasi penyediaan beserta rute jaringan dan kapasitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) BPPPTI melaksanakan proses pelelangan umum untuk pembangunan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPPPTI melaksanakan proses tender pemilihan mitra kerjasama untuk pengoperasian dan pemeliharaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Calon mitra kerjasama yang berhak mengikuti proses tender sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang memiliki jaringan serat optik paling sedikit 1.000 (seribu) kilometer.

Pasal 11

- (1) Mitra kerjasama berhak untuk:
 - a. menggunakan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengoperasian jaringan serat optik;
 - b. mengoperasikan dan memelihara jaringan serat optik; dan
 - c. memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian dan pemeliharaan jaringan serat optik.
- (2) Mitra kerjasama berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan ketentuan *open access* dan *non discriminatory* kepada pengguna jaringan serat optik;
 - b. memberlakukan tarif sewa jaringan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Posdan Informatika;
 - d. membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - e. melakukan pembukuan keuangan atas penyediaan jaringan serat optik dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI;
 - f. mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana serta layanan penyediaan jaringan serat optik berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - g. menjamin interoperabilitas sistem jaringan yang dibangun dengan sistem penyelenggara jaringan lainnya;

Pasal 12

Kontrak dengan mitra kerjasama untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau selama usia pakai maksimal jaringan serat optik.

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat meninjau kembali kontrak kerjasama pemanfaatan.

Pasal 14

- (1) Menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Fund*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR